

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian, sehingga penyusun dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penyusun tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penyusun. Untuk memperkaya bahan kajian dalam penelitian, penyusun mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi terkait judul tugas akhir yang sedang dikerjakan oleh penyusun. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Penelitian sejenis dilakukan oleh Delesa & Pebriana, (2019). Penelitian tersebut membahas dan mengkaji tentang “Prosedur Penagihan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Pada KPP Pratama Kemayoran Tahun 2018“. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwasanya prosedur penagihan pajak tahun 2018 melalui surat ketetapan pajak sudah sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara pengamatan lapang, dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan menggunakan teknik penelitian tersebut penyusun dapat mengetahui dengan lebih akurat mengenai prosedur penagihan menggunakan surat ketetapan pajak.

Penelitian sejenis dilakukan oleh Evans, (2013). Penelitian tersebut membahas dan mengkaji tentang “Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2000“. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa prosedur penagihan pajak menggunakan surat paksa dapat dilakukan apabila penanggung pajak telah melakukan seketika atau sekaligus, dan tidak dapat ditentang. Apabila terdapat beberapa pihak yang

merasa dirugikan maka dapat mengajukan surat gugatan yang dituhukan kepada pengadilan pajak.

Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara menggunakan berbagai macam pustaka, seperti buku–buku literature dan peraturan perundang – undangan serta sumber lain yang berkaitan. Dengan menggunakan penelitian tersebut penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang diteliti oleh penyusun.

Penelitian jenis ini dilakukan oleh Diah, (2014). Penelitian tersebut membahas dan mengkaji tentang “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pncairan Tunggakan Pajak”. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak disebabkan oleh rendahnya tingkat pelunasan dari Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mempunyai tunggakan pajak tersebut. Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tersebut biasanya sedang mengalami kerugian dan berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu untuk membayar tunggakan pajaknya.

Dengan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak menggunakan surat paksa dan surat teguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Adapun hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang terlampir diatas sebagai acuan penulis untuk menyelesaikan penelitian yang sedang diteliti. Selain itu dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pajak**

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar sehingga berbagai cara untuk mensukseskan pendapatan dari sektor pajak dilakukan oleh pemerintah S Suyanto, (2016).

## 2. Fungsi dan Peranan Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Siti, (2013), yaitu:

### a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

### b. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya seakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara

Menurut S Suyanto, (2016) pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### 3. Ciri-ciri Pajak

Menurut Waluyo, (2011) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

### 4. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut mardiasmo, (2016) yaitu:

- a. Menurut Golongannya
  - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan
  - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut Sifatnya
  - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
  - Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

## 5. Jenis Jenis Pajak

Pada dasarnya semua hal yang bersifat penghasilan adalah objek suatu pajak, pajak penghasilan sendiri dibagi menjadi beberapa pasal yaitu:

### 1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

PPh pasal 21 sendiri mengatur tentang pemungutan atau pemotongan pajak atas penghasilan imbalan pekerjaan atas jasa, berupa gaji, upah, tunjangan, bonus, Hr, Komisi, upah hadiah dsb yang diberikan kepada karyawan pegawai atau pekerja lepas.

### 2. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)

PPh pasal 22 digunakan untuk pemotongan dan penyeteroran pajak penghasilan atas impor barang, pajak atas penyerahan produk tertentu dan pembayaran kepada rekanan yang dibiayai oleh anggaran (Negara, Daerah, dan BUMN).

3. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

PPh Pasal 23 digunakan untuk penyetoran hasil pemungutan pajak dari penghasilan berupa bunga, deviden, saham, royalty, jasa dan juga sewa.

4. Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24)

Kredit pajak pasal 24 merupakan pengurangan yang diperoleh atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak, jika wajib pajak menggabungkan penghasilan yang diterima dari luar negeri dengan penghasilan kenapajak dalam negeri.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25)

PPh Pasal 25 merupakan PPh yang mengatur atas angsuran pajak. Angsuran pajak penghasilan setiap bulan tersebut, merupakan pajak penghasilan yang dibayar di muka dan dapat dijadikan sebagai kredit pajak (pengurangan) terhadap pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.

6. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)

PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang dibayar oleh wajib pajak dalam negeri, badan atau lembaga pemerintah, penyelenggaraan kegiatan dan badan usaha tetap atau badan perwakilan perusahaan luar negeri.

Surat pemberitahuan masa (SPT – Tahunan) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan penghasilan dan biaya, harta kewajiban dan modal pembayaran serta pemungutan pajak, sehingga diketahui pajak penghasilan yang telah dibayar atau dilunasi selama atau dalam satu tahun pajak. Jenis jenis surat pemberitahuan (SPT) tahunan sebagai berikut:

1. SPT Tahunan WP Orang pribadi / perseorangan

Surat pemberitahuan untuk melapor dan mempertanggung jawabkan atas perolehan penghasilan kena pajak, harta, kewajiban, modal, pembayaran, penyetoran hasil pemungutan pajak selama satu tahun pajak yang dibuat atau dilaporkan oleh WP Perseorangan.

## 2. SPT tahunan –WP Badan

Surat pemberitahuan untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas perolehan penghasilan kena pajak, harta, kewajiban, modal, pembayaran, penyetoran hasil pemungutan pajak selama satu tahun pajak yang dibuat atau dilaporkan oleh WP Badan.

## 6. Tarif Pajak

Menurut mardiasmo, (2016) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

### a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

### b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

### c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

### d. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## 7. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut mardiasmo, (2016), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis), pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial), sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

## 8. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Penagihan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan tindakan peneguran, peringatan, melaksanakan tindakan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyanderaan, penyitaan, maupun menjual barang agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihannya.



Menurut mardiasmo, (2016) terdapat lima teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus samaberatnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

## 9. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata Cara Pemungutan Pajak Menurut mardiasmo, (2016)

a. Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

### 1) Stelsel nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

### 2) Stelsel anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## b. Asas Pemungutan Pajak

### 1) Asas domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

### 2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

### 3) Asas kebangsaan

### 4) Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

## c. Sistem Pemungutan Pajak

### 1) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### 2) *Self Assessment System*

Suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan banyak mengawasi.

### 3) *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang tentang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## 10. Penagihan Pajak

Menurut Diana Sari, (2014) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar hutangnya. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-Undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

## 11. Surat Teguran

Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah adanya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, serta Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar. Setelah dalam jangka satu bulan sejak tanggal diterbitkan surat ketetapan sebagaimana dimaksud tersebut wajib pajak tetap tidak melunasinya, maka dilakukan suatu Tindakan penagihan dengan nama surat teguran atau surat

peringatan yang dimaksud untuk menegur atau memperingati wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

## **12. Surat Paksa**

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Pasal 1 angka 12 UU PPSP). Surat paksa diterbitkan dalam hal berikut ini :

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Surat paksa diterbitkan untuk memerintahkan dengan paksa kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan surat paksa.

## **13. Tata Cara Waktu dan Penagihan Pajak**

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut:

- a. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- b. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa.
- c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2×24 jam sejak surat paksa diberitahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

- d. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
- e. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang.

